

**DATAn**
make it matters

MENAVIGASI KECUKUPAN DAN LITERASI GIZI RUMAH TANGGA PETANI

IKHTISAR

- Berdasarkan hasil pengolahan data Susenas 2022, terdapat 51,65% rumah tangga pertanian di Indonesia mengkonsumsi cukup kalori sesuai AKG. Namun demikian, masih terdapat 7,16% rumah tangga pertanian tidak mendapatkan asupan energi dibawah kebutuhan energi minimum.
- Terdapat 8,89% rumah tangga pertanian penerima bantuan PKH yang memanfaatkan PKH untuk belanja pangan dan 7,16% rumah tangga pertanian penerima BNPT masih rawan pangan.
- Berdasarkan hasil pengolahan data Susenas tahun 2022, terdapat indikasi mengenai ketidaktahuan rumah tangga terhadap gizi makanan yang dikonsumsi, terlihat dari tingginya persentase rumah tangga pertanian yang berada pada *tier 2* (37,71%) dan *tier 3* (6,74%) merasa masih dapat menyantap makanan sehat dan bergizi.
- Minimnya literasi gizi ditengarai berdampak terhadap pemberian makanan dengan gizi tidak seimbang kepada anak bawah dua tahun pada rumah tangga pertanian yang pada akhirnya dikhawatirkan meningkatkan potensi stunting.
- Sudah saatnya promosi literasi gizi dilakukan secara gencar pada seluruh lapisan masyarakat. Untuk rumah tangga pertanian, edukasi mengenai gizi dapat juga dilakukan melalui kelompok tani. Lebih jauh, program literasi gizi perlu juga lebih gencar dilakukan oleh pendamping PKH.
- Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan untuk melihat pola belanja pangan pada rumah tangga yang mendapatkan BPNT sehingga efektivitas BPNT untuk menurunkan angka kurang gizi dapat dicapai.



Pendahuluan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-2 adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Sementara itu, salah satu target dalam Tujuan ini adalah menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi pada tahun 2030, termasuk mencapai target yang disepakati secara internasional pada tahun 2025, yaitu untuk menekan prevalensi balita pendek (*stunting*) dan kurus (*wasting*), dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula [1].

Kenyataannya, kasus kekurangan gizi masih menghantui penduduk Indonesia. BPS[2] mencatat prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment (PoU)* pada tahun 2022 di Indonesia adalah sebesar 10,21%. Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan *PoU* di atas-atas rata-rata Asia Tenggara yang sebesar 5,2% [3].

Kekurangan gizi juga masih menghantui keluarga petani yang sebagian besar masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kekurangan gizi pada keluarga petani memperburuk siklus kemiskinan dengan mengganggu produktivitas petani, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan secara keseluruhan [4][5]. Selain itu, jika petani dan keluarganya menderita kekurangan gizi, kemampuan mereka untuk menghasilkan makanan yang cukup dan menjaga kestabilan pasokan makanan akan terganggu. Dengan kata lain, SDGs ke-2 menjadi sulit dicapai jika keluarga petani sebagai tulang punggung sektor pertanian masih berada di bawah bayang-bayang permasalahan gizi.

Untuk itu, artikel ini membahas sejauh mana permasalahan pemenuhan kebutuhan gizi

dialami oleh rumah tangga petani di Indonesia dan menelusuri penyebabnya sehingga dapat diperoleh gambaran rekomendasi kebijakan berbasis data yang dapat diambil untuk meningkatkan pemenuhan gizi bagi rumah tangga petani.

Rumah Tangga Pertanian Rawan Pangan Masih Dijumpai

Di dalam artikel ini, status pemenuhan gizi mengacu pada Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Angka Rawan Pangan (ARP). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019, Angka Kecukupan Gizi (AKG) penduduk Indonesia per kapita per hari yang dianjurkan adalah 2.100 kkal dan 57 gram protein. Sementara itu, ARP mencerminkan ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur dari asupan energi kurang dari kebutuhan energi minimum, yaitu 70% dari AKG (1.400 kkal) [6].

Berdasarkan standar tersebut, di dalam artikel ini, rumah tangga kemudian dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:

- “Tier 1” (cukup kalori), apabila konsumsi kalori per kapita per hari mencukupi standar AKG (≥ 2100 kkal)
- “Tier 2” (cukup pangan), apabila konsumsi kalori per kapita per hari kurang dari AKG namun masih di atas standar ARP. Dengan kata lain konsumsi kalori berada di antara 1.400 kkal - 2.100 kkal.
- “Tier 3” (rawan pangan), apabila konsumsi kalori per kapita di bawah standar ARP (< 1.400 kkal).

Berdasarkan hasil pengolahan data Susenas 2022, terdapat 48,54% rumah tangga di Indonesia mengkonsumsi cukup kalori sesuai AKG, dan terdapat 42,75% rumah tangga yang berada di atas standar kecukupan pangan berdasarkan ARP (Gambar 1a). Namun



Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2022

Gambar 1 Persentase rumah tangga menurut kelompok konsumsi kalori, 2022 (a) seluruh rumah tangga, (b) rumah tangga pertanian

demikian, masih terdapat 8,70% rumah tangga tidak mendapatkan asupan energi dibawah kebutuhan energi minimum. Jika dibandingkan dengan angka ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) BPS tahun 2022, persentase penduduk yang berada pada tier 3 ini sedikit lebih rendah. Perbedaan metode perhitungan memungkinkan adanya perbedaan angka ini [2]¹.

Sementara itu, pola yang mirip juga terlihat pada rumah tangga pertanian² dimana setengah diantaranya telah memenuhi konsumsi kalori harian sesuai anjuran AKG. Sayangnya, masih terdapat 7,12% rumah tangga yang berada dalam keadaan rawan pangan. Ini tentunya merupakan sebuah ironi karena petani yang merupakan penghasil bahan pangan justru rawan pangan. Hal ini tentunya tidak bisa dibiarkan begitu saja agar nasib miris yang dialami keluarga petani ini dapat dikendalikan.

Harapan pada Bantuan Pemerintah

Saat ini sudah terdapat berbagai program yang menyasar masyarakat miskin untuk membantu meningkatkan taraf hidup mereka, termasuk untuk meningkatkan taraf kesehatan dan gizi mereka. Beberapa program tersebut diantaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH [7]. Meskipun PKH memang tidak ditujukan khusus untuk perbaikan gizi masyarakat miskin, salah satu pemanfaatan bantuan PKH adalah untuk untuk belanja pangan. Sekitar 85,88% keluarga petani penerima PKH menggunakan bantuan PKH untuk belanja pangan. Akan tetapi, pada Gambar 2(a) dapat dilihat bahwa 8,89% diantaranya masih tidak dapat

- 1 PoU dihitung dengan menggunakan estimasi model dengan pendekatan individual untuk *Minimum Dietary Energy Requirement* (MDER) pada setiap kelompok umur dan jenis kelamin, sedangkan artikel ini menggunakan pendekatan rumah tangga sehingga tidak mempertimbangkan kebutuhan energi berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Meskipun menggunakan pendekatan individual, indikator ini tidak tepat digunakan untuk melakukan analisis individual karena individu yang mengalami *undernourished* tidak dapat diidentifikasi. Oleh karena itu, indikator ini tidak digunakan di dalam artikel ini.
- 2 Dalam penelitian ini, rumah tangga pertanian yang dimaksud adalah rumah tangga yang kepala rumah tangganya bekerja di sektor pertanian



Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2022

Gambar 2 Persentase rumah tangga pertanian menurut kelompok konsumsi kalori, 2022 (a) rumah tangga pertanian penerima PKH dan memanfaatkannya untuk belanja pangan (b) rumah tangga pertanian penerima BPNT

memenuhi kebutuhan energi minimum. Artinya, bantuan PKH yang dimanfaatkan untuk belanja pangan suatu rumah tangga masih belum mencukupi kebutuhan energi minimum rumah tangga tersebut.

Selain PKH, juga terdapat BPNT yaitu bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai diberikan kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau e-warong (Elektronik Warung Gotong Royong) yang bekerjasama dengan bank. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan rakyat juga memperoleh nutrisi yang lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat tetapi juga protein [8]. Terlihat bahwa memang penerima BPNT yang berada di *tier 3* lebih sedikit dibandingkan dengan penerima bantuan PKH yang memanfaatkannya untuk belanja pangan. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri pula bahwa 7,16% rumah tangga pertanian penerima BPNT masih rawan pangan (Gambar 2(b)).

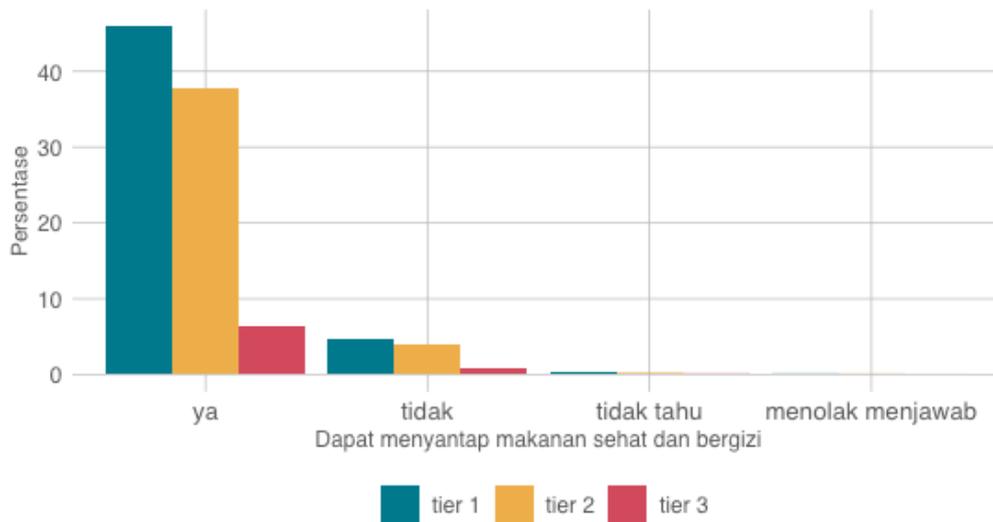
Adanya rumah tangga yang mendapat bantuan namun masih belum bisa memenuhi kebutuhan kalori harian mengindikasikan

bahwa terdapat faktor selain kemampuan membeli/mengakses makanan bergizi yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya minimum konsumsi kalori harian.

Literasi Gizi Adalah Kunci

Menurut Sulaeman dalam Arlinta [9], kurangnya gizi tidak hanya semata-mata ditentukan oleh akses terhadap makanan bergizi. Lebih dari itu, permasalahan gizi juga disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memilih sumber pangan yang baik serta mengolah dan menyajikannya dengan benar. Dengan kata lain, literasi gizi sebagai kemampuan untuk memperoleh, mengolah, dan memahami informasi gizi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan gizi yang tepat [10] memungkinkan untuk turut andil dalam menentukan status gizi rumah tangga petani.

Oleh karena itu, menjadi menarik untuk menilik literasi gizi rumah tangga pertanian karena hal tersebut adalah kunci yang menentukan apakah pada akhirnya mereka akan mengkonsumsi makanan bergizi atau tidak. Dengan kata lain, bantuan untuk mengakses makanan bergizi sekalipun tidak



Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2022

Gambar 3 Konsumsi makanan sehat dan bergizi pada rumah tangga pertanian berdasarkan kelompok konsumsi kalori

akan banyak bermanfaat apabila literasi gizi masih minim.

Meskipun pada Susenas tidak terdapat pertanyaan eksplisit mengenai literasi gizi rumah tangga, pertanyaan berupa “selama setahun terakhir, apakah ada saat di mana anda/anggota rumah tangga lainnya tidak dapat menyantap makanan sehat dan bergizi karena kurangnya uang atau sumber daya lainnya” dapat digunakan untuk mengevaluasi hal tersebut terutama ketika respon atas pertanyaan tersebut dipetakan dengan status gizi rumah tangga.

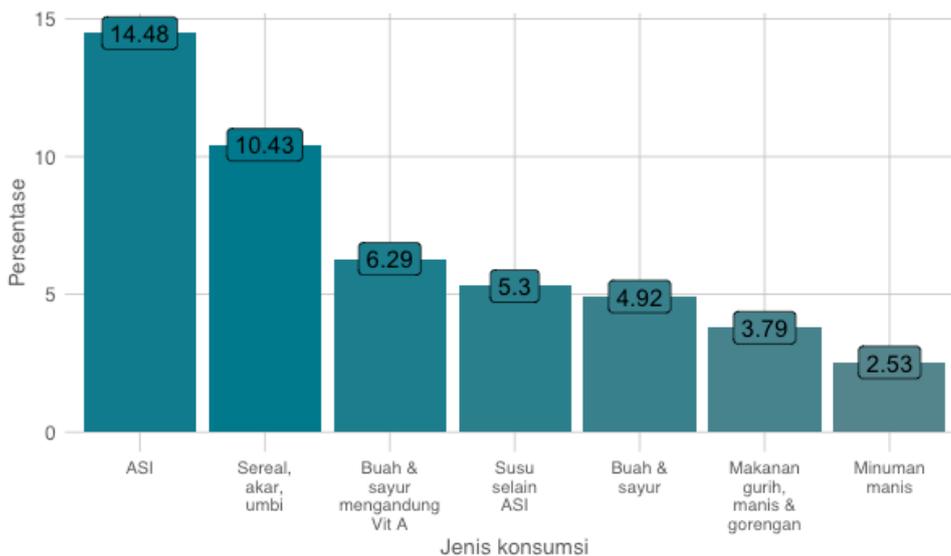
Berdasarkan hasil pengolahan data Susenas tahun 2022 seperti terlihat pada Gambar 3, memang terdapat indikasi mengenai ketidaktahuan rumah tangga terhadap gizi makanan yang dikonsumsi. Hal ini terlihat dari tingginya persentase rumah tangga pertanian yang berada pada tier 2 (37,71%) dan tier 3 (6,74%) merasa masih dapat menyantap makanan sehat dan bergizi. Dengan kata lain, terdapat rumah tangga pertanian yang pada kenyataannya tidak mampu memenuhi kebutuhan kalori harian per kapita namun masih merasa mampu

untuk mengakses dan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Sebaliknya, hanya 4,98% rumah tangga pertanian yang berada pada tier 2 dan 3 yang memang merasa tidak mampu mengonsumsi makanan bergizi.

Literasi Gizi Minim, Potensi Stunting Meningkat

Minimnya literasi gizi tentunya sangat mengkhawatirkan karena dapat meningkatkan potensi terjadinya *stunting* pada anak-anak [11]. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi *stunting* pada tahun 2022 di Indonesia adalah 21,6% [12]. Angka ini masih berada di atas batas yang ditetapkan organisasi kesehatan dunia, WHO, yaitu sebesar 20%. *Stunting* sendiri tidak hanya berakibat pada tubuh yang pendek, tetapi juga lebih rendahnya kecerdasan kognitif dan kerentanan terhadap berbagai penyakit di usia dewasa.

Tarmidzi [13] menyebutkan bahwa kekurangan protein hewani menjadi penyebab utama prevalensi *stunting* pada anak. Berdasarkan hasil Susenas 2022, rumah tangga yang mengalami kekurangan



Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2022

Gambar 4 Distribusi konsumsi anak usia 6-24 bulan pada rumah tangga pertanian dengan konsumsi protein kurang dari AKG

protein paling banyak dijumpai pada tier₂, yaitu sebesar 32%. Fokus utama dalam artikel diarahkan pada anak-anak usia 6–24 bulan (baduta) karena periode pertumbuhan kritis dan kegagalan tumbuh (*growth failure*) mulai terlihat pada kelompok umur tersebut [14]. Selain itu, analisis juga dilakukan pada rumah tangga dengan konsumsi protein yang kurang dari AKG, khususnya pada pola konsumsi baduta pada rumah tangga pertanian yang tidak mengonsumsi protein hewani (daging, ikan, telur, dan turunan susu).

Gambar 4 menunjukkan persentase balita yang tidak mengonsumsi sumber protein hewani tetapi mengonsumsi masing-masing jenis makanan/minuman yang tertera pada gambar³. Perlu menjadi catatan bahwa konsumsi masing-masing jenis makanan/minuman bersifat independen antara satu dan lainnya. Artinya, persentase dihitung terhadap setiap jenis makanan/minuman itu saja, tanpa melihat kombinasi konsumsi jenis makanan/minuman lainnya.

Merujuk pada Gambar 4, hanya terdapat 14.66% baduta yang mengonsumsi ASI. Ini

berarti sebagian besar baduta yang tidak mengonsumsi protein hewani juga tidak memperoleh ASI. Padahal, anak-anak yang diberi ASI memiliki risiko stunting yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak diberi ASI [15]. Pola konsumsi yang tidak sehat juga masih banyak dijumpai yang ditengarai disebabkan oleh minimnya pengetahuan akan gizi serta juga dipengaruhi oleh tradisi/ kebiasaan pemberian makanan pada masyarakat yang telah mengakar. Sebagai contoh, 10,65% baduta di rumah tangga petani yang mengonsumsi pangan sumber karbohidrat (sereal, akar, umbi) tetapi tidak mengonsumsi protein hewani. Hal ini sejalan dengan apa yang ditemukan dalam survei yang dilakukan oleh Kompas bahwa banyak orang tua yang hanya memberi makan anaknya dengan makanan tinggi karbohidrat namun minim protein [16]. Lebih jauh, menurut Yuamistira [17], salah satu contoh kebiasaan pemberian makanan yang salah namun menjadi tradisi adalah pemberian nasi yang dilumat dengan pisang pada bayi.

3 Persentase yang digambarkan adalah persentase baduta berdasarkan jenis makanan (namun tidak mengonsumsi protein hewani) dengan referensi waktu sehari sebelum wawancara Susenas dilakukan.

Pada Gambar 4 juga terlihat bahwa terdapat 2,78% baduta pada rumah tangga pertanian yang mengkonsumsi minuman manis tetapi tidak mengkonsumsi protein hewani. Fenomena ini juga masih sejalan dengan temuan survei Kompas bahwa terdapat kesalahan persepsi pada segelintir orang tua di Indonesia yang menganggap kental manis sebagai pengganti susu [16]. Padahal, kenyataannya, minuman dengan kental manis memiliki kadar gula yang tinggi. Di samping itu, terdapat 3,83% baduta yang mengkonsumsi makanan gurih, manis, dan gorengan, namun tidak mengkonsumsi protein hewani. Angka ini juga merupakan sinyal minimnya pengetahuan gizi orang tua pada rumah tangga petani.

Langkah Selanjutnya

Eksplorasi dan analisis data Susenas yang telah dilakukan menunjukkan indikasi lemahnya literasi atau pengetahuan gizi

masyarakat Indonesia, khususnya pada rumah tangga petani. Meskipun temuan ini sejalan dengan hasil penelitian dan survei terdahulu, akan sangat bermanfaat apabila terdapat penelitian atau survei yang memang secara khusus mengukur literasi gizi masyarakat Indonesia.

Terlepas dari hal tersebut, sudah saatnya promosi literasi gizi dilakukan secara gencar pada seluruh lapisan masyarakat. Untuk rumah tangga pertanian, edukasi mengenai gizi dapat juga dilakukan melalui kelompok tani. Lebih jauh, program literasi gizi perlu juga lebih gencar dilakukan oleh pendamping PKH. Sementara itu, monitoring dan evaluasi perlu dilakukan untuk melihat pola belanja pangan pada rumah tangga yang mendapatkan BPNT sehingga efektivitas BPNT untuk menurunkan angka kurang gizi dapat dicapai.

Referensi

- [1] Bappenas. (2023). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-2/#:~:text=Tujuan%20SDGs%20nomor%20%20yaitu,pangan%20dan%20penciptaan%20lapangan%20kerja>.
- [2] Badan Pusat Statistik. (2022). Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). Tersedia di: https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1473/sdgs_2/1. Diakses pada 18 Agustus 2023.
- [3] FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 2023. The State of Food Security and Nutrition in the World 2023. Urbanization, agrifood systems transformation and healthy diets across the rural–urban continuum. Rome, FAO. <https://doi.org/10.4060/cc3017en>
- [4] Dixon, J., Gulliver A, Gibbon, D. (2001). Farming System and Poverty: Improving Farmers' Livelihoods in a Changing World. Rome: FAO and World Bank. https://www.fao.org/3/y1860e/y1860e10.htm#P1_1
- [5] UNICEF. (2019). The State of the World's Children 2019. <https://www.unicef.org/reports/state-of-worlds-children-2019>
- [6] Badan Ketahanan Pangan. (2020). Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan 2019. Tersedia di: <https://badanpangan.go.id/storage/app/media/Bahan%202020/Laporan%20Tahunan%20BKP%202019.pdf>. Diakses pada 21 Agustus 2023.
- [7] Kemensos. (2019). Program Keluarga Harapan (PKH). Dipetik Juni 13, 2023, dari Kementerian Sosial RI: <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>
- [8] OJK. (2023). MENGENAL BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT). Dipetik 13 Juni 2023, dari OJK: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10471>
- [9] Arlinta, D. (2018). Membangun Literasi Gizi Masyarakat. Kompas, 13 Oktober 2018. Tersedia di: <https://www.kompas.id/baca/kesehatan/2018/10/13/membangun-literasi-gizi-masyarakat>. Diakses pada 23 Juni 2023.
- [10] Yarmohammadi, P., Morowatisharifabad, M. A., Rahae, Z., Khayatzadeh, S. S., Madadzadeh, F. (2022). Nutrition literacy and its related demographic factors among workers of Taraz Steel company, Chaharmahal and Bakhtiari, Iran. *Frontiers in Public Health*. Vol.10. DOI:10.3389/fpubh.2022.911619
- [11] Mauludyani, A.V.R., and Khomsan, A. (2022). Pengetahuan Gizi Ibu sebagai Determinan Stunting di Jawa Barat: Disparitas Perdesaan-Perkotaan. *Amerta Nutrition*. Vol. 6 Issue 1SP, 8-12. DOI: 10.20473/amnt.v6i1SP.2022.8-12
- [12] Kementerian Kesehatan. (2023). Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4%. Tersedia di: <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/>. Diakses pada 23 Juni 2023.
- [13] Tarmidzi, S.N. (2023). Cegah Stunting pada Anak dengan Protein Hewani. Tersedia di: <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20230125/5042277/cegah-stunting-pada-anak-dengan-protein-hewani/>. Diakses pada 23 Juni 2023
- [14] Hartono. (2016). Status Gizi Balita dan Interaksinya. *Mediakom Edisi 76 Hal 46-49*, November 2016. Tersedia di: <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/blog/20170216/0519737/status-gizi-balita-dan-interaksinya/>. Diakses pada 23 Juni 2023
- [15] Muldiasman, M., Kusharisupeni, K., Laksminingsih, E. and Besral, B. (2018), "Can early initiation to breastfeeding prevent stunting in 6–59 months old children?", *Journal of Health Research*, Vol. 32 No. 5, pp. 334-341. <https://doi.org/10.1108/JHR-08-2018-038>
- [16] Arlinta, D. (2021). Dorong Literasi Gizi Sampai ke Pelosok. Kompas, 19 Juni 2021. Tersedia di: <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/06/19/dorong-literasi-gizi-sampai-ke-pelosok>. Diakses pada 3 Juni 2023.
- [17] Yuarnistira, N., Nursalam, P.D., Rachmawati, F., Efendi, R., Pradanie, dan Hidayati. (2019). Factor Influencing the Feeding Pattern of Under-Five Children in Coastal Areas. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES)*. DOI:10.1088/1755-1315/246/1/012008



DATAin adalah artikel yang memanfaatkan sumber data alternatif untuk memberikan gagasan yang berkaitan dengan isu sosial ekonomi.

Pembaca dipersilakan mengutip artikel **DATAin** dengan menyebut sumber aslinya asalkan tidak untuk kepentingan komersial. Pandangan tulisan merupakan cerminan pemikiran dari penulis.

Redaksi **DATAin**
Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik
Badan Pusat Statistik

 bigdata.bps.go.id

 datain@bps.go.id

Terima kasih kepada Hasti Amanda Ilmi Putri, SST dan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat atas diskusi dan masukan yang berharga terkait PoU

Penanggungjawab Pelaksana

Dr. Muchammad Romzi
Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik

Reviewer

Dr. Suhariyanto
Kepala BPS Periode 2016-2021

Editor

Usman Bustaman, S.Si, M.Sc.
Khairunnisah, SST, M.S.E

Penulis

Dewi Lestari Amaliah, SST, M.B.A.
Nensi Fitria Deli, SST

Tata Letak

Nensi Fitria Deli, SST
Maulana Faris, SST
I N. Setiawan, S.Tr.Stat



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsdq@bps.go.id

